



Edisi 2

AKUNTANSI SEKTOR PUBLIK

**Drs. Tulis S. Meliala, Akt
Niko Silitonga, SE., MM
Dr. Timbul Sinaga, SE., MSA**



Edisi

2

Akuntansi Sektor Publik



Drs. Tulis S. Meliala, Akt
Niko Silitonga, SE., MM
Dr. Timbul Sinaga, SE., MSA

657.61

MEL

a

140993 - P/SB-FE

22.04.2016

No. _____
Klass _____

No. _____
Tgl. _____



Akuntansi Sektor Publik, Edisi 2

■ Drs. Tulis S. Meliala, Akt

Niko Silitonga, SE., MM

Dr. Timbul Sinaga, SE., MSA



Edisi Asli

Hak Cipta ©2007, Penerbit Semesta Media

Komplek Pertokoan Cahaya Timbul

Jln. RM. Kahfi II No. 90, Blok A4

Telp: 021 71140104

E-mail: semesta_90A4@yahoo.co.id

Hak cipta dilindungi undang-undang. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh isi buku ini dalam bentuk apa pun, baik secara elektronik maupun mekanik, termasuk memfotokopi, merekam, atau dengan menggunakan sistem penyimpanan lainnya, tanpa izin tertulis dari Penerbit.

Meliala, Tulis S.

Silitonga, Niko

Sinaga, Timbul

Akuntansi Sektor Publik

— Edisi Kedua — Jakarta: Penerbit Semesta Media, 2007.
204 hlm; 1 jil., 23 cm,

ISBN 978-979-12755-1-5

1. Akuntansi Sektor Publik

I. Akuntansi

Kata Pengantar

Buku Akuntansi Sektor Publik (Pemerintahan) edisi kedua ini kami susun semata-mata untuk menunjang kebutuhan mahasiswa yang sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan, yaitu PSAP Nomor 1 sampai dengan Nomor 11. Mengenai PSAP Nomor 1 sampai dengan Nomor 11 dan studi kasus dalam buku ini sebagian besar kami ambil dari Buku Training of Trainers Komisi Standar Akuntansi Pemerintahan (KSAP).

Kami memberanikan diri menyusun buku ini dengan tujuan agar para mahasiswa dapat lebih lancar dalam mendalami Akuntansi Sektor Publik (Pemerintahan).

Sudah pasti buku ini jauh dari sempurna, oleh karena itu kami sangat berterima kasih apabila para pembaca mau memberikan kritik dan sarannya kepada kami.

Pada kesempatan ini kami mengucapkan terimakasih kepada Ibu Evi dan Ibu Ike serta semua orang yang berpartisipasi membantu penyusunan buku edisi kedua ini, atas dorongannya sehingga terlaksananya penyelesaian buku Akuntansi Sektor Publik (Pemerintahan) ini.

Bandung, Januari 2007

Tim Penyusun



Daftar Isi

Bab 1 Pengertian	1
1.1	Pendahuluan 1
1.2	Arti Akuntansi 3
1.3	Akuntansi Sektor Publik 4
1.4	Administrasi Keuangan Negara 6
1.4.1	Pengertian Keuangan Negara 6
1.4.2	Pengertian Administrasi 6
1.4.3	Pengertian Administrasi Keuangan Negara Administrasi Keuangan Negara adalah meliputi kegiatan: 7
1.5	Ada dua pendapat tentang Siklus Anggaran. 7
1.6	Tahun Anggaran 8
1.7	Dasar Hukum Keuangan Negara 8
1.8	Pengurusan Administrasi Keuangan Negara 9
1.9	Penyusunan RAPBN 11
1.10	Cara Kerja UYHD 12
1.11	Penetapan RUU APBN 13
1.12	Pelaksanaan Undang-undang APBN 14
1.13	Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBN 14
1.14	Penyusunan APBD 15

Bab 2 Regulasi Akuntansi Sektor Publik 17

- 2.1 Fungsi Akuntansi Pemerintahan 17
- 2.2 Berbagai Regulasi yang Berhubungan Diterbitkan Negara 18
- 2.3 Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) Terdiri atas Kerangka Konseptual dan 11 Pernyataan 20

Bab 3 Komparasi Akuntansi Sektor Publik dengan Akuntansi Bisnis 21

- 3.1 Perbedaan Akuntansi Sektor Publik dengan Akuntansi Keuangan Komersial 21
- 3.2 Akuntansi Keuangan Daerah 22
- 3.3 Persamaan Akuntansi Sektor Publik dengan Akuntansi Keuangan Komersial 23

Bab 4 Kerangka Konseptual Akuntansi Pemerintahan 25

- 4.1 Kerangka Konseptual Akuntansi Pemerintahan 25
- 4.2 Peranan Laporan Keuangan 27
- 4.3 Komponen Laporan Keuangan 28
- 4.4 Tujuan Pelaporan Keuangan Pemerintah 30

Bab 5 PSAP 01 Penyajian Laporan Keuangan 33

- 5.1 Hal-hal yang Harus Diperhatikan sebagai Pedoman Penyajian Laporan Keuangan 33

Bab 6 PSAP 02 Penyajian Rekonsiliasi Anggaran 41

- 6.1 Informasi yang disajikan dalam Laporan Realisasi Anggaran 41
- 6.2 Basis Akuntansi 43
- 6.3 Struktur Laporan Realisasi Anggaran dan Klasifikasi Anggaran 45
- 6.4 Akuntansi Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan 50

Bab 7 PSAP 03 Laporan Arus Kas 69

- 7.1 Pengertian LAK 69
- 7.2 Isi LAK 69
- 7.3 Fungsi LAK 70
- 7.4 Tujuan LAK 70
- 7.5 Struktur LAK 70
- 7.6 Penyajian LAK 72
- 7.7 Metode Penyajian Laporan Arus Kas. 72
- 7.8 Hubungan Laporan Arus Kas dan Neraca 74

Bab 8 PSAP 04 Catatan Atas Laporan Keuangan 79

- 8.1 Tujuan pembuatan Catatan atas Laporan Keuangan 79
- 8.2 Isi Catatan Atas Laporan Keuangan 80
- 8.3 Langkah-langkah Penyajian Catatan Atas Laporan Keuangan 82
- 8.4 Struktur Catatan Atas Laporan Keuangan 82
- 8.5 Penyusunan Catatan Atas Laporan Keuangan 83
- 8.6 Penyajian Informasi tentang Kebijakan Fiskal/ Keuangan, Ekonomi Makro, Pencapaian Target

Undang-undang APBN/Peraturan Daerah APBD,
Berikut Kendala dan Hambatan yang Dihadapi dalam
Pencapaian Target 84

Bab 9 PSAP 05 Persediaan	87
9.1 Pengakuan dan Pengukuran Persediaan	89
9.2 Persediaan Disajikan Sebesar:	91
9.3 Perhitungan Biaya Persediaan	92
9.4 Biaya Konversi Persediaan	93
9.5 Penyajian dan Pengungkapan Persediaan	93
Bab 10 PSAP 06 Akuntansi Investasi	95
10.1 Investasi pemerintah dibagi menjadi 2 yaitu:	95
10.2 Pengakuan, Pengukuran, dan Metode Penilaian Investasi	97
10.3 Pengakuan Hasil Investasi	102
10.4 Pelepasan dan Pemindahan Investasi	108
10.5 Penyajian dan Pengungkapan Investasi	109

Bab 11 PSAP 07 Akuntansi Aset Tetap 111

- 11.1 Pengakuan dan Pengukuran Aset Tetap 112
- 11.2 Perolehan Secara Gabungan 116
- 11.3 Pertukaran Aset Tetap 116
- 11.4 Aset Donasi 118
- 11.5 Aset Bersejarah 119
- 11.6 Perlakuan Aset Tetap Setelah Perolehan 119
- 11.7 Penilaian Kembali (Revaluation) 124
- 11.8 Penghentian dan Pelepasan 124
- 11.9 Penyajian dan Pengungkapan Aset Tetap 125

Bab 12 PSAP 08 Akuntansi Konstruksi dalam Pengerjaan 129

- 12.1 Pengakuan Konstruksi dalam Pengerjaan 130
- 12.2 Pengukuran Konstruksi dalam Pengerjaan 132

PSAP 09 Akuntansi Kewajiban 139

- 13.1 Pengakuan dan Pengukuran Kewajiban 142
- 13.2 Utang Kepada Pihak Ketiga (Account Payable) 145
- 13.3 Utang Bunga (Accrued Interest) 145
- 13.4 Utang Perhitungan Pihak Ketiga (PFK) 146
- 13.5 Bagian Lancar Utang Jangka Panjang 146
- 13.6 Kewajiban Lancar Lainnya (Other Current Liabilities) 147
- 13.7 Utang Pemerintah yang tidak Diperjualbelikan dan yang

Diperjualbelikan.	147
13.8 Perubahan Valuta Asing	149
13.9 Penyelesaian Kewajiban Sebelum Jatuh Tempo	151
13.10 Tunggakan	151
13.11 Restrukturisasi Utang	152
13.12 Penghapusan Utang	153
13.13 Biaya-biaya yang Berhubungan dengan Utang Pemerintah	154
13. 14 Penyajian dan Pengungkapan.	155

Bab 14 PSAP 10 Koreksi Kesalahan, Perubahan Kebijakan Akuntansi, dan Peristiwa Luar Biasa 157

14.1 Koreksi Kesalahan	158
14.2 Kesalahan dan Koreksinya	159
14.3 Pengungkapan dalam Catatan Atas Laporan Keuangan	167
14.4 Perubahan Kebijakan Akuntansi	167
14.5 Pengungkapan	169
14.6 Peristiwa Luar Biasa	170

Bab 15 PSAP 11 Laporan Keuangan Konsolidasi 173

15.1 Penyajian Laporan Keuangan Konsolidasian	174
15.2 Entitas pelaporan	175
15.3 Entitas Akuntansi	175
15.4 Badan Layanan Umum	175
15.5 Prosedur dan Penyajian Laporan Keuangan Konsolidasian Komponen Laporan Keuangan Konsolidasian	176

Soal Latihan 183

Daftar Pusaka 191

Tentang Penulis 193

Bab 1

Pengertian

1.1 Pendahuluan

Istilah Akuntansi sering digunakan oleh dunia pendidikan dan perusahaan pada saat ini, namun secara umum sebagian besar mengartikan bahwa akuntansi hanya mempunyai satu arti saja. Sebenarnya ada perbedaan pengertian Akuntansi dalam beberapa hal seperti:

- a. Akuntansi Keuangan (Komersial).
- b. Akuntansi Biaya
- c. Akuntansi Manajemen
- d. Akuntansi Anggaran
- e. Akuntansi Pajak
- f. Akuntansi Sektor Publik yang terdiri atas:

1. Akuntansi Pemerintahan.

Terdiri atas: - Akuntansi Pusat dan

- Akuntansi Daerah.

2. Akuntansi Rumah Sakit.
3. Akuntansi Pendidikan, dan sebagainya.
4. Akuntansi LSM.

Di dalam buku ini kita tidak membahas Akuntansi Keuangan Komersial, Akuntansi Biaya, dan yang lainnya tetapi hanya membahas tentang Akuntansi Sektor Publik yang berhubungan dengan Akuntansi Anggaran.

Hal-hal yang perlu menjadi perhatian adalah

1. Yang membedakan Akuntansi Keuangan dengan Akuntansi Sektor Publik adalah harus diperhatikannya penekanan dalam hal siapa yang mengelola sumber dananya dan dari mana sumber dana tersebut, yaitu apakah sumber dana tersebut dari suatu entitas perorangan atau suatu entitas yang sumber dananya dari beberapa orang dengan membentuk badan (organisasi) yang tujuannya mencari laba (profit motif), atau suatu entitas (organisasi) yang sumber dananya dari masyarakat umum atau publik yang tujuannya tidak mencari laba (non profit motif).

Seperti kita ketahui bahwa dalam masyarakat banyak terdapat macam-macam organisasi yang namanya juga beragam seperti, Pemerintah itu sendiri, Yayasan Rumah Sakit, Yayasan Pendidikan, LSM, dan sebagainya.

Semua organisasi-organisasi ini kita sebut dengan "Entitas-entitas ."

2. Bagi semua entitas-entitas yang menggunakan dana publik (umum), maka akuntansi yang digunakannya harus menggunakan Akuntansi Sektor Publik, sedangkan bagi entitas-entitas yang tidak menggunakan dana umum (publik), maka akuntansi yang digunakan adalah Akuntansi Komersial.
3. Hal prinsipil lain adalah bahwa dalam organisasi (entitas) yang profit motif, tujuan utamanya adalah bagaimana mengelola dana yang mereka himpun untuk mendapatkan laba yang akan terlihat dari laporan keuangan yang merupakan hasil dari sebuah proses akuntansi, yaitu akuntansi keuangan komersial.

Sedangkan pada organisasi (entitas) yang non profit motif, tujuannya adalah untuk mempertanggungjawabkan atas penerimaan uang yang mereka terima dari masyarakat, apakah penerimaan-penerimaan (pendapatan) tersebut telah digunakan dengan tepat atau benar sesuai dengan yang digariskan atau ketentuan-ketentuan yang telah dibuat.

4. Entitas-entitas (organisasi-organisasi) yang ada didalam masyarakat ini kita golong-golongkan atas:
 - a. Organisasi yang "Profit Motif".
 - b. Organisasi yang "Non Profit Motif".
5. Untuk Akuntansi keuangan komersial yang profit motif, maka yang menjadi standarnya adalah PSAK.

Sedangkan untuk Akuntansi Sektor Publik yang non profit motif, maka yang menjadi standarnya adalah sebagai berikut:

- a. Untuk Akuntansi Pemerintahan, yang menjadi standarnya adalah PSAP nomor 1 sampai dengan nomor 11.
- b. Untuk Akuntansi sektor publik lainnya yang dimiliki oleh perorangan maupun badan, maka yang menjadi standarnya adalah PSAK nomor 45.

1.2 Arti Akuntansi

Sebelum memulai pembahasan akuntansi sektor publik atau akuntansi pemerintahan terlebih dahulu akan dikemukakan pengetahuan dasar tentang akuntansi.

Akuntansi adalah:

Suatu sistem informasi, mengidentifikasi, pencatatan, klasifikasi, mengikhtisarkan, dan mengkomunikasikan kegiatan perusahaan. Yang sering disebut "Bahasa Perusahaan".

Literatur lain mengatakan bahwa:

Akuntansi adalah:

Suatu proses pengumpulan, pencatatan, pengklasifikasian peringkasan, penganalisaan, dan pelaporan transaksi keuangan dari suatu kesatuan ekonomi untuk menyediakan **informasi keuangan** bagi para pemakai laporan yang berguna untuk pengambilan keputusan.

Informasi Keuangan yang menggunakan dana dari publik maka perlakuan akuntansinya kita sebut Akuntansi Sektor Publik

serta laporan keuangannya juga harus mengikuti standar prosedur penyusunan laporan keuangan sektor publik.

Informasi Keuangan yang menggunakan dana dari perorangan atau badan maka perlakuan akuntansinya kita sebut Akuntansi Keuangan serta laporan keuangannya juga harus mengikuti standar prosedur penyusunan laporan keuangan komersial.

1.3 Akuntansi Sektor Publik

Publik = masyarakat atau umum.

Jika organisasi publik (entitas)nya adalah pemerintah maka dalam hal ini penerima dana masyarakat adalah "pemerintah", dan dana tersebut akan digunakan pemerintah untuk kepentingan rakyat umum (masyarakat) dan negara, maka dana yang digunakan pemerintah tersebut harus dilaporkan kepada rakyat dalam bentuk suatu laporan pertanggungjawaban melalui sebuah proses akuntansi yaitu akuntansi sektor publik yang dalam hal ini adalah Akuntansi Pemerintahan.

Proses akuntansi yang digunakan disini, untuk penyusunan pelaporan pertanggungjawabannya adalah PSAP nomor 1 sampai dengan nomor 11.

Sedangkan batasan tentang akuntansi sektor publiknya adalah sebagai berikut:

Jika organisasi publik (entitas)nya bukan pemerintah tetapi entitas yang lain, maka batasan tentang akuntansi sektor publiknya sebagai berikut:

Definisi Akuntansi Sektor Publik adalah suatu proses pengumpulan, pencatatan, pengklasifikasian, penganalisaan, dan pelaporan transaksi keuangan dari suatu **organisasi publik** yang menyediakan informasi keuangan bagi para pemakai laporan keuangan yang berguna untuk mengambil keputusan.

Definisi Akuntansi Pemerintah adalah suatu proses pengumpulan, pencatatan, pengklasifikasian, penganalisaan, dan pelaporan transaksi keuangan dari suatu **pemerintahan** yang menyediakan informasi keuangan bagi para pemakai laporan keuangan yang berguna untuk mengambil keputusan.

Maka perbedaan Accounting Financial dengan Accounting Publik adalah:

- Akuntansi Keuangan = yang mengelola adalah pihak swasta atau perusahaan pemerintah yang tujuannya profit motif.
- Akuntansi Sektor Publik = yang mengelola adalah pihak swasta atau pemerintah yang tujuannya non profit motif (nirlaba).

Untuk perusahaan-perusahaan negara yang dananya juga dari masyarakat tetapi tujuan perusahaannya adalah profit motif seperti PT. Perkebunan, BUMN, dan lain-lain maka akuntansi yang digunakan adalah akuntansi keuangan komersial.

Adapun tujuan diberikan pelajaran akuntansi sektor publik adalah:

1. Untuk memberikan gambaran tentang akuntansi pemerintah secara menyeluruh agar kita dapat mengetahui jalannya pengurusan administrasi keuangan negara.
2. Untuk memberikan pengetahuan tentang suatu sistem penyelenggaraan tata usaha keuangan negara Indonesia dan sistem yang dilakukan di negara lain.
3. Untuk memberikan gambaran tentang akuntansi Rumah Sakit, Yayasan Pendidikan, dan Akuntansi Sektor Publik untuk entitas lain yang nirlaba.

Karakteristik Akuntansi Sektor Publik:

- Nonprofit motif.
- Dimiliki secara kolektif.
- Pihak-pihak yang memberikan sumber keuangan tidak harus menerima imbalan langsung (baik barang maupun jasa).

Sedangkan Karakteristik bagi Akuntansi Komersial adalah:

- Profit motif.
- Dimiliki secara perorangan atau badan